

Analisis Proses Penatausahaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendidikan Papua Tengah)

Exel Dominick Lantemona^{1*}, Kristian Hoegh Pride Lambe², Mika Mallisa³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

exeldom@icloud.com^{*}

^{*}Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses penatausahaan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan studi kasus pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan di Dinas Pendidikan Papua Tengah mencakup Perencanaan Anggaran, Pencatatan Transaksi Keuangan, Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Keuangan. Sementara itu, penyusunan laporan keuangan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penyusunan Laporan, Verifikasi dan Validasi Data, serta Audit Internal dan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerapan penatausahaan dalam penyusunan laporan keuangan diimplementasikan melalui beberapa aspek penting, yaitu: pencatatan yang akurat, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), verifikasi data, pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Kata kunci: Proses, penatausahaan, laporan keuangan, Pemerintah Daerah, akuntabilitas.

Abstract

This study analyzes the bookkeeping process in the preparation of Local Government Financial Reports, with a case study at the Central Papua Province Education Office. This descriptive qualitative research utilizes primary data from interviews and observations, as well as secondary data in the form of documents and related literature. The results show that the bookkeeping process at the Central Papua Education Office includes Budget Planning, Financial Transaction Recording, Internal Control, and a Financial Information System. Meanwhile, the preparation of financial reports goes through the stages of Data Collection, Report Compilation, Data Verification and Validation, and Internal and External Audits by the Supreme Audit Agency (BPK). The implementation of bookkeeping in the preparation of financial reports is carried out through several key aspects, namely: accurate recording, compliance with Government Accounting Standards (SAP), data verification, internal control, use of information technology, improvement of human resource competency, as well as transparency and accountability. However, this study found obstacles such as limited human resources and inadequate technological infrastructure.

Keywords: Process, bookkeeping, financial reports, Local Government, accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran

negara. Laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel, dan transparan menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat (Anggoro et al., 2021). Oleh karena

itu, penting bagi setiap instansi pemerintahan untuk memiliki sistem penatausahaan keuangan yang efektif dan efisien guna menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, dalam praktiknya, implementasi penatausahaan keuangan di beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan (Purnama & Suparwoto, 2020).

Kualitas laporan keuangan pemerintah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM), ketersediaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta efektivitas pengendalian internal (Suryani, 2022). Di sisi lain, beberapa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya masalah pada tata kelola keuangan di tingkat instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan belum optimalnya proses penatausahaan. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada keandalan laporan, tetapi juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data di tingkat manajemen dan merusak kepercayaan publik.

Studi kasus pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menemukan bahwa meskipun telah ada prosedur penatausahaan, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Berdasarkan wawancara dan observasi, proses penatausahaan di dinas ini mencakup tahapan perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan. Sementara itu, penyusunan laporan keuangan melibatkan pengumpulan data, kompilasi laporan, verifikasi data, hingga audit. Meskipun demikian, tantangan pada SDM dan infrastruktur teknologi menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik, yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting karena fokus pada analisis mendalam terhadap proses penatausahaan, yang merupakan inti dari akuntabilitas keuangan pemerintah. Dengan mengkaji secara spesifik kendala seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi di

Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris yang berharga tentang tantangan yang dihadapi instansi pemerintah di wilayah yang mungkin memiliki karakteristik unik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya melalui peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akuntansi sektor publik, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana penerapan penatausahaan diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Grand Theory

Penelitian ini didasarkan pada dua pilar teoretis utama, yaitu Teori Akuntabilitas Sektor Publik dan Teori Kelembagaan (Institutional Theory). Teori akuntabilitas menekankan bahwa entitas sektor publik, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat (Suryani, 2022). Laporan keuangan menjadi instrumen vital untuk memenuhi akuntabilitas ini, sehingga kualitas dan keandalannya menjadi sangat krusial.

Sementara itu, Teori Kelembagaan menyoroti bagaimana institusi, termasuk norma, aturan, dan praktik, membentuk perilaku organisasi. Dalam konteks ini, proses penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan bukan hanya sekadar prosedur teknis, melainkan juga praktik yang dipengaruhi oleh aturan formal (seperti Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dan norma informal dalam organisasi. Penelitian ini melihat bagaimana

penerapan penatausahaan di Dinas Pendidikan Papua Tengah dipengaruhi oleh kondisi internal kelembagaan, seperti ketersediaan sumber daya dan infrastruktur.

Definisi Operasional Konsep Kunci

Penatausahaan Keuangan: Merujuk pada serangkaian proses administratif dan teknis yang meliputi perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian internal, dan penggunaan sistem informasi keuangan. Dalam penelitian ini, penatausahaan diukur dari efektivitas implementasi setiap tahapan tersebut di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja finansial, dan aliran kas suatu entitas pemerintah, yang digunakan untuk tujuan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (Purnama & Suparwoto, 2020). Kualitas laporan keuangan diukur dari aspek keandalan, akurasi, dan transparansi.

Sumber Daya Manusia (SDM): Mengacu pada kompetensi, keahlian, dan jumlah personel yang terlibat dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan. Keterbatasan SDM diartikan sebagai kurangnya staf dengan latar belakang akuntansi yang memadai, pelatihan yang minim, atau jumlah staf yang tidak proporsional dengan beban kerja.

Infrastruktur Teknologi: Meliputi ketersediaan dan fungsionalitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIAKD) dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Budiwitjaksono (2023) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi lain oleh Buntuan et al. (2025) juga memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem akuntansi yang baik sangat krusial untuk akuntabilitas laporan keuangan.

Sementara itu, penelitian tentang tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah menunjukkan beberapa hambatan. Salah satu studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu (IPDN, 2023)

menemukan bahwa kurangnya kompetensi dan jumlah aparatur menjadi faktor penghambat utama. Hambatan lain yang sering ditemukan adalah sistem aplikasi yang belum sesuai kebutuhan dan pengendalian yang lemah (Erlangga Adhitya, 2023). Temuan-temuan ini selaras dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi.

Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji hubungan antara kompetensi SDM, sistem informasi, dan kualitas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat kuantitatif dan mengkaji hubungan antar variabel secara umum. Analisis mendalam mengenai proses penatausahaan secara kualitatif, dari tahap ke tahap, serta bagaimana hambatan spesifik seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi benar-benar memengaruhi alur kerja harian dan kualitas laporan yang dihasilkan, masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi kasus mendalam pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan umum dari studi sebelumnya, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai "bagaimana" dan "mengapa" kendala tersebut muncul dan berdampak pada praktik penatausahaan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menawarkan perspektif yang unik dari sebuah instansi pemerintah di wilayah yang karakteristiknya mungkin berbeda dari lokasi penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru bagi literatur akuntansi sektor publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses penatausahaan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik fenomena yang kompleks dalam konteks aslinya, serta mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku di

lapangan (Creswell, 2018). Desain studi kasus sangat relevan untuk penelitian ini karena fokus pada satu entitas tunggal, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti (Yin, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dan berfokus pada kedalaman informasi, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan topik penelitian, yaitu individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait proses penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Individu-individu tersebut meliputi kepala dinas, kepala seksi keuangan, serta staf yang bertanggung jawab langsung terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan.

Lokasi penelitian adalah di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Waktu penelitian dilakukan selama periode satu bulan, dimulai dari bulan Juli hingga Agustus 2025. Periode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengobservasi secara langsung siklus pencatatan dan pelaporan keuangan yang sedang berjalan, serta memperoleh data primer yang relevan melalui wawancara dengan informan kunci. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terkait, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan tahunan, dan peraturan internal dinas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014). Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mulai mencari pola, tema, atau hubungan antar data untuk merumuskan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data dipastikan melalui teknik triangulasi sumber,

yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil dari penelitian kualitatif yang dilakukan, mencakup karakteristik informan, ringkasan hasil wawancara, dan analisis tematik. Hasil ini diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen yang relevan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Jabatan/Posisi	Latar Belakang Pendidikan
1.	Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan	Tidak disebutkan
2.	Kepala Seksi Keuangan	Tidak disebutkan
3.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Tidak disebutkan
4.	Kepala Bidang	Tidak disebutkan
5.	Staf Pencatatan dan Pelaporan Aset Daerah	Tidak disebutkan

Sumber: Data primer penelitian, 2025

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Tema	Pernyataan Kunci Informan	Interpretasi Peneliti
1.	Proses Penatausahaan	"Proses dimulai dari pencatatan transaksi yang terjadi setiap hari. Kami mencatat semua pengeluaran dan pemasukan secara detail."	Penatausahaan mencakup pencatatan transaksi secara rutin dan terperinci.
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	"Kami mengumpulkan semua data transaksi keuangan dan menyusunnya sesuai format data yang Standar Akuntansi Pemerintahan dan melewati (SAP)... Laporan tersebut kemudian diperiksa kembali oleh Inspektorat."	Penyusunan laporan adalah proses kompilasi data yang divalidasi dengan standar akuntansi dan melewati proses verifikasi internal.
3.	Kendala yang Dihadapi	"Kami masih kekurangan staf pada"	Terdapat kendala aspek

No.	Tema	Pernyataan Kunci Informan	Interpretasi Peneliti
4.	Infrastruktur Teknologi	dengan latar sumber daya belakang manusia, baik dari akuntansi... segi jumlah seringkali masih maupun ada kesalahan kompetensi. dalam pencatatan yang perlu diperbaiki."	Penggunaan sistem informasi keuangan belum berjalan secara maksimal, mengindikasikan keterbatasan infrastruktur teknologi.
		"Kami menggunakan sistem informasi keuangan daerah yang disediakan oleh pemerintah, tetapi masih belum optimal..."	
5.	Dampak Penatausahaan	"Penerapan penatausahaan yang baik memberikan dampak positif terhadap transparansi laporan keuangan kami."	Penatausahaan yang efektif berkorelasi langsung dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Sumber: Data primer hasil wawancara, 2025

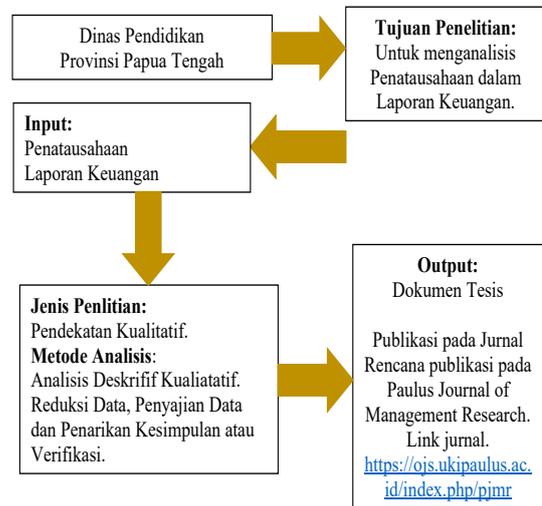
Tabel 3. Analisis Tematik

Tema	Kode Tematik	Kutipan Pendukung
Proses Penatausahaan	Pencatatan Transaksi	"Proses penatausahaan yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dimulai dari pencatatan transaksi yang terjadi setiap hari."
	Peran Sistem Informasi	"Kami menggunakan sistem yang disediakan pemerintah..."
	Pengendalian Internal	"Kami melakukan pengecekan dua kali untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan laporan sudah akurat."
Penyusunan Laporan Keuangan	Pengumpulan dan Validasi Data	"Laporan keuangan di Dinas Pendidikan disusun dengan mengumpulkan seluruh data transaksi yang

Tema	Kode Tematik	Kutipan Pendukung
Kendala dan Tantangan	Kepatuhan pada Standar	terjadi selama satu tahun anggaran... diperiksa kembali oleh Inspektorat." "Laporan tersebut kemudian disusun dalam format yang sesuai dengan SAP."
	Infrastruktur Teknologi	"...kurangnya staf dengan latar belakang akuntansi... seringkali masih ada kesalahan dalam pencatatan." "...kami menemukan beberapa kendala seperti infrastruktur teknologi yang belum memadai."
Dampak Penatausahaan	Peningkatan Akuntabilitas	"...dampak positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan."
	Peningkatan Transparansi	"Laporan yang disusun dengan akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran..."

Sumber: Data primer hasil wawancara, 2025

Pembahasan



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 1. Kerangka konseptual

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dan mengacu pada kerangka konseptual yang telah ditetapkan, pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah mengenai proses penatausahaan serta kendala dan dampaknya terhadap laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Kerangka

konseptual penelitian ini menghubungkan Proses Penatausahaan sebagai variabel utama yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan, dengan Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi bertindak sebagai variabel yang memoderasi atau menghambat efektivitas proses tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah memang berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tahapan yang telah diidentifikasi dalam kerangka konseptual, yaitu dimulai dari perencanaan anggaran hingga audit eksternal. Temuan ini selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya prosedur yang terstruktur untuk menjamin keandalan laporan keuangan (Anggoro et al., 2021). Namun, temuan kunci dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara prosedur ideal dan praktik di lapangan yang disebabkan oleh kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi penghambat nyata yang secara langsung memengaruhi proses penatausahaan. Kurangnya staf dengan latar belakang akuntansi menyebabkan seringnya terjadi kesalahan pencatatan, yang pada akhirnya memerlukan koreksi yang memakan waktu. Fenomena ini mengkonfirmasi hipotesis dalam kerangka konseptual bahwa kualitas SDM adalah prasyarat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat (Budiwitjaksono, 2023). Selain itu, meskipun telah menggunakan sistem informasi keuangan daerah, informan mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi yang belum memadai menghambat optimalisasi sistem tersebut.

Adapun dampak dari kendala ini secara langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP dan melalui verifikasi, kendala-kendala yang ada dapat mengancam keandalan dan akurasinya. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penatausahaan yang dilakukan memiliki dampak positif yang nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ketika laporan disusun dengan benar, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi bahwa penatausahaan yang efektif, yang didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai, adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang mendalam, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah mengenai proses penatausahaan dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Temuan menunjukkan bahwa proses tersebut sudah terstruktur dengan baik, mencakup tahapan yang sistematis dari perencanaan anggaran hingga audit eksternal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala signifikan yang menghambat optimalisasi proses, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur formal telah diterapkan, kendala praktis di lapangan masih menjadi tantangan utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Temuan penelitian ini memperkuat teori akuntabilitas dan kelembagaan dengan menunjukkan bahwa efektivitas sistem akuntansi publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kompetensi staf dan ketersediaan sarana pendukung. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan pembuat kebijakan lainnya tentang area yang memerlukan perbaikan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih modern menjadi langkah krusial untuk memastikan keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sifat studi kasus yang terfokus pada satu entitas, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, membuat generalisasi hasil penelitian ke instansi lain menjadi terbatas. Kedua, penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang didasarkan pada persepsi informan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif secara kuantitatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji isu yang sama dengan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan melakukan survei pada populasi yang lebih luas untuk mengukur secara statistik pengaruh kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi terhadap kualitas laporan

keuangan. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengkomparasi proses penatausahaan di beberapa instansi pemerintah yang berbeda, baik di dalam satu provinsi maupun di provinsi lain, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, B. A., Wardhani, E., & Handayani, W. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.3638/JAKP.v4i1.1221>
- Budiwitjaksono, S. M. T. G. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *OPTIMAL*, 19(1), 19–39.
- Buntuan, R., Yamin Noch, M., Pasolo, F., Zakaria, Z., & Suratini, S. (2025). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 183–196. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1530>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Febriana, L., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Basis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 437–448. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1652>
- IPDN. (2023). Hambatan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89-105. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/arti cle/download/3417/1586/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Purnama, Y., & Suparwoto, S. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 154-168.
- Sutaryo, & Sinaga, I. D. (2018). Pengaruh kapasitas SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 226-240.
- Suryani, A. (2022). Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 12(3), 201-215. <https://doi.org/10.13246/JMAk.v12i3.201.22>
- Wahyuni, S., & Sari, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 456–470.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.